



Peran Agama Serta Implementasi Komunikasi dan Manajemen Konflik dalam Kerusuhan Sosial di Losari Brebes Jawa Tengah

Muchamad Yuliyanto¹⁾

¹⁾ Penulis adalah staf pengajar jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang. Alumnus Program Pascasarjana UNS Solo.

Abstract: horizontal conflict at Losari beginning from young men fight at two border area that going bigger and become social riot and plundering Chinese shops. Religion as prophetic teaching—that trying to develop equality between men—is actually fails to internalize to their community. Communication and conflict resolution primarily played by actor namely religious and community figure that still have authority or power and honored by their community. Good cooperation between Losari Regency government with religious and community figure is one of key success to perform conflict resolution that begin with communication between two community involved that horizontal conflict. Keywords: conflict management, Communication, role of religion.

PENDAHULUAN

Pada kenyataan hidup umat manusia, keragaman dan perbedaan sosial, ekonomi, budaya, agama, serta etnis di antara sesama merupakan keniscayaan yang harus diterima sebagai kodrat alamiah. Ketika seseorang lahir ke alam dunia, ia sudah membawa takdir ganda, sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial. Kedua sifat dalam praktik sering berbenturan dan menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai makhluk individu dengan ketidakmampuan berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya, maka ia harus berinteraksi dengan orang lain yang perlu diatur secara bersama, lalu terbentuklah komunitas. Sebab setiap individu memiliki keinginan dan kepentingan yang beragam, maka muncul benih-benih perbedaan bahkan konflik yang membawa banyak konsekuensi pada bentuk kerjasama dalam suatu komunitas.

Kerjasama di antara individu dalam masyarakat umumnya bersifat *antagonistic cooperation*, yakni kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki prinsip saling bertentangan. Di sinilah awal munculnya terminologi pluralisme dan konflik di tengah masyarakat. Namun, perbedaan kepentingan yang tajam dan menguatnya patologi sosial seperti; prasangka, *stereotype*, disparitas sosial, diskriminasi, dan etnosentrisme telah memudahkan masyarakat mengalami kegoncangan dalam membangun integrasi sosial, dan akibatnya berubah menjadi konflik horisontal. Sebagaimana dengan masyarakat di wilayah Losari yang terdiri dari Losari Barat (Kabupaten Cirebon, Jawa Barat) dan Losari Timur (Kabupaten Brebes, Jawa Tengah) yang merupakan komunitas sosial yang dipisahkan Sungai Cisanggarong sekaligus perbatasan Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keduanya merupakan komunitas dengan basis kehidupan ekonomi dari sektor nelayan, pertanian, dan perdagangan dengan urat nadi pasar Losari yang sebelumnya dikenal sebagai tipe masyarakat yang tentram, damai, dan dinamis dengan kehidupan sosial ekonomi yang mencukupi. Tiba-tiba pada 12 Februari 1998 terjadi kerusuhan sosial berupa konflik antara komunitas Losari Barat dengan Losari Timur. Selanjutnya, konflik ini berkepanjangan dalam bentuk tawuran kembali antarpemuda kedua wilayah pada 7 Desember 1998, dan terulang kembali 7 Juli 1999 dengan skala konflik yang semakin luas dan besar dampaknya pada kehidupan sosial masyarakat.

Konflik horisontal di Losari berawal dari tawuran antarpemuda kedua wilayah perbatasan yang membesar jadi kerusuhan sosial serta diikuti perusakan maupun penjarahan toko-toko milik warga keturunan etnis Tionghoa, baik yang



berada di pasar Losari Lor maupun Losari Kidul (keduanya masuk wilayah Losari Timur, Brebes). Padahal sebenarnya masyarakat di wilayah Losari tersebut dikenal cukup ramah, terbuka, toleran, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang cukup pluralistik karena dalam keseharian hidup berdampingan, meskipun berbeda wilayah termasuk dengan kalangan etnis Tionghoa dalam berdagang di pasar Losari. Artinya, di tengah masyarakat terdapat sebuah pandangan dan pemahaman yang mengakui bahwa terdapat keanekaragaman ide, keinginan, kepentingan, bahkan latar belakang sosial ekonomi dan etnis di antara berbagai pihak di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Di samping itu, secara kultural masyarakat di wilayah Losari sebagian besar (63,5%) beragama Islam dan pengaruh jajaran agamawan, yakni para kiai atau guru mengaji amat kuat di tengah masyarakat. Artinya, eksistensi para kiai cukup disegani dan memiliki wibawa di hadapan masyarakat. Namun demikian, kehidupan perekonomian masyarakat pantai ini dalam kondisi miskin dan secara sosial masih agak terbelakang, meskipun secara geografis berada pada jalur transportasi yang amat strategis karena menghubungkan dua provinsi besar, yakni Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dipicu dengan kenaikan harga sembako sejak krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997 ikut menciptakan suasana kegelisahan bahkan frustrasi masyarakat di Losari karena dirasakan begitu mahal bahan sembilan kebutuhan pokok (sembako). Sementara itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Losari menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di pasar Losari yang menguasai bahan sembako adalah para pedagang etnis Tionghoa, dan terdapat fenomena kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat cukup mencolok. Fenomena ini tampak berubah menjadi perilaku kebencian dan kekerasan ketika terjadi konflik horisontal antaranggota masyarakat justru salah satu sasaran kerusuhan adalah warga etnis Tionghoa yang terdapat di wilayah Losari tersebut.

Menurut F. Magnis Suseno⁴ terdapat dua unsur pada pluralisme sosial (masyarakat yang plural), yakni *pertama*, pluralitas itu ditangani atas dasar ketidaksamaan. Masyarakat seluruhnya tersusun secara hirarkis, dan semua unsur di dalamnya yang berbeda-beda mempunyai tempat dan kedudukan sosial tertentu. Hal ini sebagaimana di Losari terdapat ketidaksamaan kehidupan ekonomi antara penduduk Jawa dengan etnis Tionghoa di wilayah tersebut, dan perbedaan kehidupan ekonomi antara masyarakat Losari Barat dengan Losari Timur. Apalagi ketika pedagang etnis Tionghoa dianggap telah menguasai kehidupan perdagangan di pasar Losari.

Kedua, wawasan kemanusiaan (pramodern) biasanya membagi manusia ke dalam 'orang kami' dan 'orang asing'. Hal ini terjadi pada masyarakat di Losari yang telah ditunjukkan pada saat meletus konflik sosial sasaran diperluas pada warga keturunan etnis Tionghoa yang telah menetap lama, namun ternyata belum dianggap sebagai "orang kami" bagi masyarakat Losari. Kerusuhan sosial di Losari Brebes berdampak cukup luas pada kehidupan sektor ekonomi daerah bahkan nasional sebab akibat konflik sosial itu terjadi di wilayah perbatasan yang strategis bagi jalur perekonomian nasional, jalur lalu lintas di kedua wilayah macet total dan terganggu selama hampir satu bulan sehingga memperlambat laju transportasi darat yang amat menentukan bagi kelancaran pengiriman barang dagangan antar-ke dua propinsi.

PERMASALAHAN

Paparan di atas menunjukkan bahwa konflik horisontal yang bermula dari konflik antarpemuda kedua komunitas telah menjadi salah satu *patologi sosial* dari masyarakat plural seperti bangsa Indonesia ini. Sementara dalam konteks komunikasi antar-kebudayaan telah dikenalkan berbagai teori dan praktik solusi atas konflik sosial dengan mengedepankan akar penyebab konflik sampai pendekatan yang diajarkan di dalamnya. Oleh karena itu, persoalan yang akan dibahas adalah; apa akar penyebab konflik di Losari Brebes? Bagaimanakah peran agama serta implementasi komunikasi dan manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Akar Pemicu Konflik



Kondisi masyarakat yang plural memiliki berbagai potensi laten yang bisa memunculkan konflik, seperti halnya dengan masyarakat Losari yang memiliki keragaman sosial budaya bahkan etnis ternyata dalam dinamikanya terdapat perilaku sebagian masyarakat yang menjadi “pupuk” bagi suburnya akar penyebab konflik di antaranya sebagai berikut.

a. Gejala Prasangka Sosial

Gejala prasangka sosial merupakan sikap antipati yang didasarkan pada suatu cara menggeneralisasi sesuatu yang salah, dan tidak bersifat fleksibel.² Gejala ini terjadi pada sikap antipati terhadap etnis Tionghoa yang berdagang di pasar Losari dianggap akan mendominasi kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atau kelompok atas dasar komparasi dengan kelompoknya sendiri. Jadi, menilai orang-orang Tionghoa di Losari atas indikator yang dimiliki masyarakat Losari yang solider, mau bermasyarakat, dan *andhap asor* sehingga tidak mungkin menghasilkan objektivitas.

b. Stereotipe

Stereotipe adalah sikap dan karakter yang dimiliki seseorang untuk menilai orang lain semata-mata berdasarkan pengelompokan kelas atau pengelompokan yang dibuatnya sendiri.³ Stereotipe terjadi di antara sikap pemuda Losari Barat terhadap Losari Timur yang menyebabkan mereka mudah terlibat tawuran massal.

c. Disparitas Sosial

Disparitas sosial merupakan tingkat kesulitan dalam penerimaan seseorang atau kelompok terhadap orang lain di antara mereka. Akibatnya, terjadi perasaan untuk memisahkan (jarak) di antara mereka.⁴ Jarak sosial terjadi antara masyarakat Jawa Losari dengan etnis Tionghoa yang sebenarnya telah lama menjadi warga di wilayah Losari. Hal ini lebih disebabkan perbedaan kultur dan ekonomi di antara mereka dalam kesehariannya.

d. Menguatnya Etnosentrisme

Etnosentrisme merupakan sikap dan perasaan yang merasa bahwa kelompok etnisnya lebih unggul (superior) norma-normanya daripada kelompok (etnis) yang lain di tengah-tengah masyarakat (Plennington, 1976). Menguatnya sentimen orang Jawa asli di masyarakat Losari ketika melihat: orang Tionghoa tidak mau berbaur atau bermasyarakat dengan penduduk pribumi, orang Tionghoa merasa lebih kuat ekonominya dan berbeda kultur yang diyakininya.

e. Fenomena Menguatnya Eksklusivitas Etnis

Fenomena terjadi sebagai konsekuensi etnosentrisme atas dasar kesamaan agama dan kepercayaan di era globalisasi ini. Hal demikian, terlihat dengan jumlah warga Tionghoa di Losari yang sebagian besar beragama Nasrani, sedangkan warga Losari adalah penganut Islam yang cukup kuat. Akibatnya, terjadi keengganan di antara kedua warga untuk berinteraksi dalam keseharian, kecuali hanya pada saat berlangsung transaksi bisnis di pasar Losari.

Pluralitas masyarakat seperti di Indonesia adalah suatu keniscayaan sejarah yang membutuhkan perhatian dan keseriusan untuk terus mengedepankan dan menginternalisasikan sikap toleran, terbuka, inklusif, dan *multikulturalisme* dengan substansi siap menerima dan menghargai perbedaan lengkap dengan konsekuensinya. Sebagaimana konsepsi *plural society* dari Furnival (1940), yakni “masyarakat dengan ciri kehidupan berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik”. Untuk memperkuat sikap dan pandangan masyarakat sebagai antitesis dari berkembangnya berbagai patologi sosial, maka dibutuhkan komunikasi multikultur yang mengajarkan pada setiap individu untuk menerima, memahami, dan saling menghargai perbedaan kultur yang hadir di tengah masyarakat.

2. Teori Penyebab Konflik

Keragaman sosial juga membawa konsekuensi seringnya terjadi perbenturan kepentingan dan perbedaan keinginan di tengah masyarakat. Pengelolaan perbedaan yang tidak dilandasi sikap dan pandangan multikultur sering memunculkan



konflik horisontal sebagaimana terjadi di Losari. Kepemilikan identitas maupun aset sosial (alamiah) masing-masing individu atau kelompok juga sering menjadi salah satu pemicu konflik, maka dalam menganalisis kerusuhan sosial sebagai bentuk konflik terdapat beberapa teori penyebab konflik (Kartikasari, 2000) antara lain sebagai berikut.

a. Teori *hubungan masyarakat (social relations)* yang berpandangan bahwa konflik di tengah masyarakat terjadi karena terdapat polarisasi yang permanen serta ketidakpercayaan dan permusuhan antarkelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, terdapat polarisasi antara pemuda dan preman Losari Barat dan Losari Timur dalam menguasai area parkir maupun keamanan di pasar Losari di samping persaingan antarkedua pemuda karena persoalan sepele.

b. Teori *kesalahpahaman antarbudaya* yang melihat bahwa konflik di tengah masyarakat muncul akibat ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang ada. Kerusuhan sosial di Losari mengindikasikan bahwa penjarahan dan perusakan toko-toko etnis Tionghoa karena pemahaman budaya maupun agama yang berbeda di antara mereka.

c. Teori *kebutuhan manusia* yang berpandangan bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat memiliki akar penyebab tidak terpenuhinya atau dihalanginya kebutuhan dasar, baik yang bersifat fisik, mental maupun sosial. Sebagaimana teori ini dari hasil riset di lapangan menunjukkan terdapat persaingan antara pemuda maupun preman Losari Barat dengan Losari Timur yang sudah lama berlangsung dalam memperebutkan penguasaan area di sekitar pasar Losari. Persaingan tersulut perkelahian kecil antar-kedua pemuda saat memancing di sungai Cisanggarong lalu berubah menjadi kerusuhan massal di seluruh wilayah Losari.

d. Teori *identitas* yang melihat bahwa konflik muncul lebih disebabkan identitas sosial suatu kelompok terancam keberlangsungannya yang berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak selesai. Teori ini bisa sebagai dasar menganalisis kerusuhan sosial yang berujung pada perusakan dan pembakaran toko-toko Tionghoa karena terdapat ketakutan kalau mereka akan menguasai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Losari umumnya. Apalagi terdapat kondisi nasional berupa gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim Soeharto, ikut mempengaruhi psikologi pemuda pada saat awal kerusuhan sosial terjadi di Losari.

e. Teori *transformasi konflik* yang memiliki pandangan bahwa konflik muncul di tengah masyarakat disebabkan adanya masalah-masalah ketidakadilan maupun ketidaksetaraan yang muncul dalam masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun dalam pandangan pemuda Losari Barat terdapat diskriminasi dalam penguasaan area sekitar pasar Losari, di samping terdapatnya kondisi ekonomi yang amat mencolok perbedaannya antara Losari Barat dengan Losari Timur sehingga memicu kecemburuan ekonomi apalagi dengan warga keturunan Tionghoa yang menguasai sebagian toko di pasar.

Adapun penyelesaian konflik sosial seperti di Losari Brebes tersebut, sudah saatnya mengimplementasikan komunikasi dan manajemen konflik sebagai instrumen untuk menciptakan solusi dengan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya melalui pendidikan multikultur serta menekankan kembali etika sosial dan sikap altruistik sebagaimana pendapat Peter Adler⁵ bahwa “seseorang yang multikultural harus memegang prinsip bahwa dia harus berhadapan dengan makin banyak perbedaan budaya yang nyata dari orang lain”. Untuk merealisasikannya dibutuhkan pendidikan multikultural melalui *intercultural communication* sebagai pengayaan setiap individu di tengah masyarakat dalam rangka meredusir sempitnya wawasan masyarakat, *prejudice*, kemiskinan intelektual, maupun politisasi budaya dan agama. Di samping itu, sudah saatnya masyarakat melakukan apa yang ditawarkan Friezt R. Tambunan (*Kompas*/20/7/05), yakni mewacanakan *peacebuilding* maupun *sense of community* bagi warga bangsa yang hidup di alam keragaman seperti saat ini.

3. Peran Agama

Konflik sosial yang terjadi di Losari sesungguhnya bisa diantisipasi ketika kita mencoba untuk memberdayakan agama sebagai kekuatan profetik yang mengajarkan nilai-nilai sosial sebagai landasan dalam membangun interaksi sosial. Kekuatan profetik agama ditunjukkan dengan aksentuasi ajaran yang lebih mengutamakan etika sosial, yakni ajaran yang menjadikan setiap individu pemeluk agama memiliki kepedulian (paling sederhana sekalipun) terhadap orang lain di sekitarnya, yang lebih



dilandasi semangat kemanusiannya. Hal ini sebagaimana pandangan Franz Magnis Suseno (*Kompas*, 31/1/05) bahwa “dalam perspektif *civil society* peran agama adalah pembawa nilai-nilai, sebagai suara profetis yang menagih kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan solidaritas yang tidak membiarkan pragmatisme politik melindas harkat moralitas”.

Artinya, agama Islam yang dominan di wilayah Losari sudah seharusnya diajarkan para da'i untuk mengaksentuasikan nilai-nilai sosial yang terdapat di dalamnya. Kerusuhan sosial yang terjadi melibatkan dua komunitas yang sebagian besar beragama Islam, dengan perilaku keagamaan yang cukup patuh dan segan terhadap kaum agamawan (para kiai) lokal yang ada. Terbukti upaya untuk memadamkan kerusuhan dan selanjutnya upaya solusi konflik dirintis para kiai bersama tokoh masyarakat (sesepuh kampung) yang difasilitasi aparat pemerintah (camat dan kepala desa). Para tokoh pemuda dan masyarakat kedua Losari dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas kerusuhan sosial yang berawal dari tawuran antarpemuda, atas prakarsa para kiai dan sesepuh desa yang cukup disegani di wilayahnya. Bahkan, konsensus perdamaian di antara para tokoh pemuda kedua desa juga disaksikan kiai dan jajaran Muspika Losari.

Dalam konteks resolusi konflik dalam kerusuhan sosial di Losari peran agama lebih ditunjukkan melalui personalisasi ajaran agama ke dalam figur agamawan. Masyarakat tidak peduli dengan isi ajaran agama yang sesungguhnya amat bijak, tetapi dalam praktik keseharian masyarakat lebih patuh pada persona yang dianggap memiliki kelebihan pengetahuan agama dan dianggap pantas sebagai “suri teladan” masyarakatnya.

Fenomena demikian memperkuat penilaian tentang “kegagalan” fungsi sosial agama di tengah masyarakat kontemporer. Ajaran agama lebih dipahami sebagai kebutuhan internal perorangan dalam berurusan dengan Tuhan atau dikenal sebagai ekspresi *fiqh individual* yang bersifat rutin, dan sebaliknya ajaran agama tidak pernah dipahami sebagai nilai yang membingkai kehidupan sosial yang humanistik, egaliter, dan solider dengan sesamanya atau dikenal *fiqh sosial* yang menjadi substansi sebagian besar ajaran agama. Senada dengan peran agama dalam masyarakat plural, terdapat tawaran dari Leonardo Boff tentang lima jenis etika yang dianggap mendesak untuk dunia saat ini, yakni: *pertama*, etika yang menyerukan umat manusia untuk saling melihat antara satu sama lain (dalam pengertian positif). Setiap orang bertanggungjawab terhadap kondisi orang lain sebagai temannya. *Kedua*, etika solidaritas yang ditandai oleh sikap solidaritas terhadap siapa saja yang dililit kesulitan. Masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk saling membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sebenarnya ketika etika ini berjalan pada masyarakat Losari yang memang dalam kondisi miskin dan kesulitan hidup, bisa jadi kerusuhan yang dipicu tawuran antarpemuda tidak bakal membesar sampai mengorbankan keberadaan masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut.

Ketiga, etika tanggung jawab yang lebih mengutamakan sikap tanggung jawab setiap orang terhadap pemikiran, ucapan, dan tingkah-laku dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menuntut orang lain untuk mempertanggungjawabkan kepada orang lain dan Tuhan. *Keempat*, etika berdialog yang diawali dengan dialog yang hidup, tulus, dan ikhlas. Apa yang difokuskan dalam dialog sekarang adalah kehidupan, ketulusan, kebenaran, dan kebaikan umat manusia yang bertanggungjawab terhadap kehidupan mereka. Rendahnya intensitas komunikasi sosial di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda di wilayah Losari menjadi salah satu pemicu mudahnya terjadi konflik horisontal. Persoalan perebutan lahan parkir dan pembagian jalur angkutan di depan pasar Losari yang tidak pernah dikomunikasikan di antara mereka, telah menjadi “patologi sosial” tersembunyi yang tiba-tiba muncul dalam bentuk konflik yang dipicu perkelahian antarpemuda saja. Terbukti pada saat berlangsung resolusi konflik, peran komunikasi dialogis yang diselenggarakan Muspika dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor determinan untuk menghentikan kerusuhan sosial.

Kelima, etika suci yang mencakup dan dapat diterima oleh seluruh pihak sebab ia didahului oleh nilai-nilai kebaikan secara universal yang dapat diterima semua dalam setiap kondisi. Etika suci ini sebenarnya bisa diekspresikan dalam bentuk ajaran agama yang sarat nilai-nilai kebersamaan dan kesederajatan sebagai sesama umat manusia.

4. Implementasi Komunikasi dan Manajemen Konflik

Kerusuhan sosial sebagai salah satu bentuk konflik bisa dicari solusinya melalui bangunan manajemen konflik, yakni upaya untuk mencari penyelesaian konflik dengan mengelola berbagai komponen dan pihak yang terlibat di dalamnya.



Adapun manajemen konflik bisa diaplikasikan ketika didukung perangkat keterampilan teknis, sebagaimana pendapat Winardi⁶ bahwa terdapat tiga keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah konflik, di antaranya sebagai berikut.

a. *Keterampilan teknis* yang berupa kemampuan seseorang untuk mempergunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan untuk melaksanakan tugas khusus pasca-pelatihan. Keterampilan ini direalisasikan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan pada tokoh masyarakat atau pihak lain sebagai pembekalan diri terkait dengan kemampuan intelektualitasnya secara komprehensif dalam mencari solusi konflik. Contoh: *training* manajemen konflik bagi *opinion leader* di suatu wilayah tertentu.

b. *Keterampilan human relations* yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun jaringan maupun relasi sosial yang bisa dijadikan komponen untuk menopang manajemen konflik. Suatu konflik yang bersifat kompleks seperti kerusuhan sosial di Losari Brebes tersebut, dibutuhkan pandangan dan penyelesaian secara luas, bahkan melibatkan unsur yang berada di luar jangkauan konflik secara langsung. Kuncinya adalah jaringan sosial yang dimiliki orang-orang yang terlibat konflik yang dibangun melalui komunikasi.

c. *Keterampilan konseptual* yang berwujud kemampuan seseorang untuk memahami kompleksitas masyarakat secara menyeluruh, termasuk mengetahui apakah yang dilakukannya sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada. Keterampilan ini mengajarkan pada setiap individu untuk selalu memperhatikan dinamika dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai referensi untuk memudahkan setiap usaha mencari solusi atas konflik yang terjadi. Oleh karenanya, amat diperlukan keberadaan dokumen yang berhubungan dengan dinamika sebuah masyarakat. Modal kultur masyarakat Losari Brebes yang terbuka, ramah, dan komunikatif sebenarnya merupakan *basic needs* untuk memudahkan setiap individu membangun jaringan sosial yang luas, bahkan bisa dijadikan sarana meredam konflik untuk tidak berubah menjadi kerusuhan sosial seperti yang terjadi antara tahun 1998-1999 lalu.

Keterampilan untuk modal manajemen konflik di atas tidak akan aplikabel tanpa diikuti rumusan praktis untuk melakukannya. Oleh karena itu, *Johan Galtung* (SENDI, edisi 4-5, 2001 : 5) memberikan rumusan praktis sebagai berikut.

a. Konflik diawali dari masalah apa? Siapa saja yang terlibat? Serta apa tujuan dari mereka? Maksudnya, berbagai pihak yang berusaha mencari solusi kerusuhan sosial di Losari harus mencari akar pemicu konflik selama ini lengkap dengan para pelakunya.

b. Apakah akar terdalam dari konflik bersumber pada persoalan struktur atau kultur? Atau meliputi keduanya? Konflik horisontal di Losari Brebes ternyata berakar dari persoalan kultur, yakni persaingan antarpemuda dan kecemburuan sosial masyarakat dengan etnis Tionghoa yang dianggap telah menguasai perekonomian di Pasar Losari.

c. Jenis gagasan apa yang ditawarkan satu pihak agar diterima pihak lain? Terutama gagasan kreatif dan baru. Apakah idenya cukup kuat untuk mencegah meletusnya konflik dan kekerasan? Setelah berlangsung pertemuan antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Muspida kedua kabupaten muncul ide untuk mempertemukan di antara tokoh pelaku kerusuhan untuk saling mengungkapkan keinginan dan harapan masing-masing pihak setelah kerusuhan berlangsung dan menjalar pada perusakan dan penjarahan.

d. Jika kekerasan dalam konflik telah berlangsung bagaimana memandang efek-efek laten? Apakah semuanya dianggap sebagai alasan balas dendam dan meraih kemuliaan? Ternyata pasca-kerusuhan sosial di Losari masih terpendam trauma masyarakat (khususnya Tionghoa) untuk membaur dengan masyarakat umum dan perasaan dendam di kalangan pemuda kedua wilayah karena terdapatnya anggota pemuda Losari Timur yang mati dan belum ada penyelesaian hukum sampai saat ini.

e. Siapakah yang berusaha mencegah kekerasan dalam konflik? Apakah visi mereka terhadap hasil konflik dan metodenya? Serta bagaimana bisa mendukung mereka? Peran aktif untuk mencegah kekerasan sosial meluas dan berkepanjangan lebih banyak dilakukan para tokoh agama (NU) dan tokoh masyarakat bekerjasama dengan pihak kabupaten (Kesbang Linmas).

f. Siapakah yang memiliki inisiatif melakukan rekonstruksi, rekonsiliasi serta resolusi? Dari hasil riset di lapangan diketahui bahwa inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi banyak datang dari tokoh agama yang berpengaruh (para kiai NU) dan



panutan masyarakat termasuk tokoh-tokoh preman (sebagian pemuda) kedua pihak yang menguasai area sekitar Pasar Losari Brebes.

Selain keterampilan dan rumusan praktis di atas juga perlu diperhatikan peran utama *komunikasi* dalam usaha mencari resolusi konflik. Dalam hal ini Littlejohn⁷ menawarkan konsepsi tentang *direct communication* yang memiliki tiga keuntungan ketika diaplikasikan dalam manajemen konflik, di antaranya sebagai berikut.

a. Komunikasi itu sifatnya simbolis dan tidak mendatangkan konsekuensi yang sesungguhnya dari gerakan nyata. Melalui komunikasi, setajam apapun perbedaan di antara anggota masyarakat hanya dikonseptualisasikan ke ranah komunikasi dan tidak diikuti gerakan nyata yang mengantarkan lahirnya konflik terbuka. Semua bisa dimediasi dalam komunikasi yang berlangsung di antara pihak yang terlibat.

b. Komunikasi mengubah kemungkinan gerakan dan bisa mengurangi tingkat persaingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Berbagai perbedaan dan harapan telah diformat ke dalam pesan komunikasi sehingga mengurangi persaingan yang mengarah pada konflik.

c. Komunikasi bisa menghasilkan perubahan orientasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Orientasi berubah terutama setelah terdapat dialog yang membawa implikasi pemahaman baru di antara pihak-pihak yang terlibat masalah, sehingga arah dan tujuan individu atau kelompok bisa mengalami perubahan. Setelah berlangsung komunikasi di antara para tokoh pemuda yang didampingi tokoh agama dan Muspida kedua kabupaten selanjutnya kerusuhan mereda karena masing-masing pihak telah berusaha mengendalikan anggotanya setelah saling memahami masalah dan akibat dari kerusuhan sosial di wilayah Losari tersebut.

Kerusuhan sosial seperti di Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah antara 1998-1999 lalu sebagai salah satu bentuk konflik menurut pandangan Ralf Dahrendorf (Mc Quaire (1995)⁸ merupakan persoalan yang secara potensial maupun nyata pasti terjadi, sehingga pertikaian sosial tersebut pada akhirnya akan membawa pada perubahan sosial. Hal ini didasarkan pada empat alasan pokok sebagai berikut.

a. Setiap masyarakat selalu tunduk pada momentum perubahan. Apa yang terjadi dengan kerusuhan sosial di Losari sedikit banyak diilhami merebaknya gerakan reformasi bahkan kerusuhan di beberapa kota (Jakarta dan Solo) menjelang lengsernya Presiden Soeharto.

b. Setiap masyarakat selalu mengalami konflik sosial.

c. Setiap elemen dalam masyarakat memberikan kontribusi dalam perubahan. Perubahan perilaku sebagian masyarakat di Losari sedikit atau banyak disebabkan perubahan kebiasaan dan perilaku anak muda terutama yang berprofesi sebagai preman yang bersaing dalam menguasai area pasar Losari.

d. Setiap masyarakat selalu mengalami hambatan dari sejumlah anggota masyarakat yang lain. Penguasaan yang dominan atas wilayah Pasar Losari mengakibatkan kesulitan angkutan/transportasi yang berasal dari Losari Barat (Cirebon) masuk ke wilayah Losari Timur (Brebes) yang hanya dibatasi Jembatan Cisanggarong. Hal ini dianggap menghambat usaha orang Losari Barat untuk mencari penghidupan ekonomi di wilayah Losari Timur.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Studi empirik sebagaimana paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pemicu utama dari tawuran antarpemuda di wilayah Losari adalah persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi (pembagian wilayah parkir dan area bisnis/pasar dan rute transportasi). Hal ini lebih disebabkan kondisi kemiskinan yang mendera sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan Losari tersebut. Persaingan antarpemuda berdampak pada permusuhan “tersembunyi” karena ikut melibatkan kalangan *preman* yang menguasai area parkir dan rute transportasi di



depan Pasar Losari. Tawuran antarpemuda kedua Losari segera membesar jadi kerusuhan sosial di antaranya dipicu keterlibatan jajaran preman di dalamnya.

b. Fenomena kesenjangan sosial ekonomi yang dipahami masyarakat dalam bentuk penguasaan perdagangan barang sembako di pasar Losari yang didominasi warga keturunan Tionghoa memunculkan kecemburuan sosial, yang kemudian diekspresikan dalam *aksi anarkhisme* dengan menjarah dan merusak toko/perumahan etnis Tionghoa, pada saat peristiwa kerusuhan sosial yang dipicu tawuran antarpemuda kedua Losari.

c. Jarak sosial (*social gap*) di tengah masyarakat dipahami dalam bentuk tidak adanya interaksi atau tidak pernah berlangsung komunikasi sosial antara warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi asli Losari, sehingga terdapat semacam adagium “orang kami” dan “orang mereka”. Ketika pecah kerusuhan sosial, perasaan ini berubah menjadi tindak anarkhisme warga Losari terhadap keturunan Tionghoa di wilayah tersebut.

d. Agama sebagai sumber ajaran profetik yang berupaya membangun kesederajatan hidup sesama manusia ternyata gagal *diinternalisasikan* ke dalam anggota masyarakat. Terbukti pelaku kerusuhan yang melibatkan jajaran pemuda dan masyarakat Losari sebagian besar memeluk agama Islam. Peran agama lebih ditunjukkan oleh para agamawan/tokoh agama (personifikasi), yakni para tokoh NU di kedua wilayah sebagai panutan pada saat mencari solusi atas konflik yang terjadi.

e. Komunikasi dan resolusi konflik lebih banyak dimainkan oleh aktor yang berupa tokoh agama dan tokoh masyarakat (sesepuh desa) yang masih dianggap memiliki wibawa dan disegani masyarakat sekitarnya. Kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten (Muspika Losari) bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan menjalankan resolusi konflik yang diawali dengan komunikasi di antara kedua masyarakat yang terlibat konflik horisontal tersebut.

2. Rekomendasi

Hasil pembahasan dari riset sederhana yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan rekomendasi.

a. Peran komunikasi dan manajemen konflik menjadi faktor determinan dalam setiap upaya mencari penyelesaian atas konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat plural seperti Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, materi manajemen konflik dan komunikasi multikultur menjadi bagian substantif yang perlu diajarkan dalam proses pendidikan nasional kita.

b. Para tokoh agama perlu lebih mengaksentuasikan isi ajaran agama yang berdimensi fiqh sosial sebagai strategi membangun masyarakat agamis dan mampu hidup berdampingan secara damai dan toleran.

c. Patologi sosial yang berujud kecemburuan sosial, *prejudice*, diskriminasi, dan perilaku anti sosial hanya bisa direduksi dari benak masyarakat apabila komunikasi sosial dan budaya dijadikan sarana mediasi untuk mengeliminasi penyakit sosial tersebut sebagaimana tawaran Howell,⁹ yakni kecakapan komunikasi (*Concious Competence*) yang artinya seseorang berpikir tentang kecakapan komunikasinya dan secara terus menerus berusaha mengubah apa yang ia lakukan supaya menjadi lebih efektif. Di samping itu, perlu diinternalisasikan semangat *solidaritas sosial* melalui pendekatan kultur, yakni melakukan *assimiliasi struktural* maupun *akomodasi* agar kelompok minoritas bisa diterima kelompok mayoritas yang dominan sebagaimana kelompok masyarakat yang lain.

d. Pemerintah kabupaten harus lebih bertanggungjawab untuk segera mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat yang merupakan akar penyebab konflik sosial yang mudah terjadi di negeri kita saat ini. Kesulitan hidup dan kesenjangan sosial sering lebih dimaknai dalam konteks ekonomi, sehingga memudahkan terjadi kecemburuan sosial yang mudah berubah dalam bentuk perilaku destruktif dengan sesama warga masyarakat.

ENDNOTE

¹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 34.

² Alolifiweri, *Gatra-Gatra: Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 175.

³ *Ibid.*, hal. 176.



⁴ *Ibid.*, hal. 177.

⁵ Aloliliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 89.

⁶ Winardi, *Manajemen Konflik* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 57.

⁷ Littlejohn (1999; 478)

⁸ Tumomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 260.

⁹ *Ibid.*, hal. 69.

DAFTAR PUSTAKA

Aloliliweri. 2001. *Gatra-Gatra: Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS.

Anonim. 2003. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: diterbitkan INIS Universitas Leiden bekerjasama dengan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.

Kartikasari, SN (Ed.) 2000. *Mengelola Konflik*. Jakarta: RTC British Council.

Kompas edisi 31 Januari dan 20 Juli 2005.

Littlejohn, Stephen W. 1999. *Theories of Human Communication*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Rahardjo, Tumomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozi, Syafuan, dkk. 2006. *Kekerasan Komunal: Anatomi & Resolusi Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SENDI, Edisi 4-5, tahun 2001.

Suseno, Franz Magnis. 2000. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Rajawali Press.